

Pemerintah RI Didesak Lebih Gencar Ingatkan Bahaya Bromat di Air Minum

Bromat merupakan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker.

JAKARTA(IM)- Isu mengenai bromat dalam kandungan air minum dalam kemasan (AMDK) masih menjadi pembicaraan. Oleh karena itu, Pengamat Hukum Kesehatan, Firdaus Diezo mendesak pemerintah Republik Indonesia (RI) lebih gencar dalam menyosialisasikan bahaya Bromat yang terkandung dalam setiap air minum dalam kemasan (AMDK).

Hal ini menyusul ancaman kanker yang disebabkan oleh zat beracun

tersebut di dalam tubuh.

Seperti diketahui, penelitian pada hewan menunjukkan bahwa bromat dapat menyebabkan kanker, namun pengaruhnya terhadap manusia masih belum diketahui.

Ini menekankan bahwa bahaya bromat perlu diketahui oleh masyarakat luas. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat karena hal ini sangat berkaitan dengan produktivitas dan hak mereka untuk hidup layak.

Ini melanjutkan bahwa sosialisasi merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tidak jatuh sakit. Menurutnya, penting untuk mengantisipasi bahaya bromat sebelum terlambat sehingga tidak ada korban yang berjatuhan.

Ini juga mengungkapkan bahwa bromat telah terbukti dapat menyebabkan diare, sebuah penyakit yang tidak bisa dianggap remeh karena sering terjadi di masyarakat. Keberadaan diare, tambahnya, menunjukkan bahwa Indonesia masih belum sepenuhnya lepas dari status negara berkembang.

"Indonesia unikanya gitu. Tidak makan, busung lapar; kalau makan,

keracunan makanan. Nah pantaslah negara kita jadi negara dunia ketiga terus kalau begini," katanya.

Ketua YLKI Sumatera Barat, Zulnadi mengatakan bahwa pemerintah seharusnya dapat memberikan perhatian lebih terkait perlindungan masyarakat.

Dia melanjutkan, pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung kesehatan masyarakat terkait bromat. "Pengambil keputusan harus berani tidak membiarkan konsumen atau masyarakat teraniaya dari produk-produk yang berkeadilan di pasaran," kata Zulnadi.

Ini menekankan bahwa pemerintah, melalui lembaga terkait, harus melakukan so-

alisasi dan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjamin kualitas produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

Zulnadi menambahkan bahwa perlindungan konsumen adalah tanggung jawab bersama antara produsen dan pemerintah. Ini melanjutkan bahwa konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk yang mereka pilih.

"Kita berharap konsumen kita itu teliti di dalam menentukan yang menjadi pilihannya apakah ini berbahaya atau tidak berbahaya," katanya. ● **tom**

DARI HAL 1

Luhut: IKN Tidak Ada Masalah...

Negara (Mensesneg) Pratikno dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6).

Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Dhony, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang.

"Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Dhony Rahajoe. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono," kata

Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6) lalu.

Pratikno menyebutkan, Jokowi pun telah menekan keputusan presiden terkait pemberhentian Bambang dan Dhony sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN.

Dalam keputusan presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Men-

teri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Dhony sebelumnya dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai pimpinan Otorita IKN pada 10 Maret 2022. Keduanya sedianya bertugas untuk periode 2022-2027.

Jokowi Berkantor di IKN

Presiden Joko Widodo optimistis bisa mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat. Rencananya, Jokowi akan berkantor sekitar akhir Juni atau awal Juli 2024.

Kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air.

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu, air. Airnya Juli," kata Jokowi dalam keterangannya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (5/6).

Terkait ketersediaan air, pihaknya sudah meresmikan Bendungan Sepaku, yang akan mengairi sejumlah permukiman di IKN.

"Airnya juga kemarin sudah kita resmikan dengan Bendungan Sepaku. Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan

air, kemudian dialirkan ke bangunan, rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," tuturnya.

Sebelumnya, kepastian Presiden berkantor juga disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono. Ia menyatakan, rencana Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara tetap sesuai jadwal (on schedule) usai Bambang Susantono mengundurkan diri sebagai OIKN.

Ia menyebutkan, Jokowi akan berkantor jika sejumlah utilitas sudah terpasang, termasuk saluran air. ● **mar**

Luhut Sebut Australia Marah Setelah...

nikel di tahun 2023. Angka ini terus melonjak sejak tahun 2014 yang lalu.

Untuk diketahui, London Metal Exchange (LME) baru saja menyetujui pen-

catatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia, dengan kode "DX-zwdx" pada akhir

Mei yang lalu. LME sendiri merupakan bursa berjangka dan opsi terbesar dan tertua di

dunia untuk perdagangan logam industri, termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. ● **mar**

1 Juli 2024, Polri Uji Coba...

kat ialah bukti terdaftar sebagai peserta JKN aktif. Bukti kepesertaan itulah akan dicek pertama kali oleh petugas pembuatan SIM di seluruh Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (satpas) di polda wilayah.

"Daerah uji coba, sebagai pertimbangan dipilih daerah-daerah yang cakupan kepesertaan JKN-nya sudah tinggi di atas 95 persen sehingga hampir seluruh penduduk di wilayah tersebut sudah menjadi peserta JKN," ucap Heru kepada wartawan, Rabu (5/6).

Heru mengatakan masyarakat juga dapat

mengecek status kepesertaan JKN-nya melalui laman resmi BPJS atau melalui kanal layanan WhatsApp (WA) BPJS Kesehatan dengan nomor 08118165165.

Selain itu, masyarakat juga dapat meminta bantuan petugas untuk mengecek status kepesertaan aktif JKN atau BPJS saat sedang membuat SIM.

"Pertama bagi yang sudah memilikinya bisa mengeceknya terlebih dahulu melalui kanal layanan WA BPJS Kesehatan 08118165165," jelas Heru.

"Bagi yang tidak melampirkan, maka pengecekan dilakukan dengan NIK," ujar dia.

Kemudian, apabila status JKN tidak aktif, petugas akan tetap memproses SIM. Namun SIM baru bisa diambil setelah menyerahkan dan menunjukkan bukti kepesertaan dalam JKN.

Bukti tersebut misalnya berupa nomor virtual account (VA) pendaftaran atau bukti bayar lunas atau bukti mengikuti program atau cicilan iuran pada aplikasi JKN.

"Untuk nomor virtual tersebut, peserta hanya mendaftar saja dan belum melakukan pembayaran iuran ke BPJS," ucap Heru.

Lebih jauh, Heru menambahkan, masyarakat

juga tidak perlu datang ke kantor BPJS untuk mendaftar JKN. Dia mengatakan masyarakat yang belum terdaftar di JKN bisa melakukan pendaftaran secara online.

"Kami sudah sediakan petunjuk alur pendaftaran dalam bentuk banner yang dipasang di layanan SIM sehingga pemohon SIM akan mudah mengakses tidak perlu ke kantor BPJS," terangnya.

Seperti diketahui, Polri akan menerapkan aturan baru yang mewajibkan BPJS Kesehatan sebagai syarat pembuatan dan perpanjangan SIM. Pemohon harus menunjukkan bukti

keanggotaan BPJS Kesehatan atau JKN yang masih aktif.

Ketentuan ini akan diuji coba mulai 1 Juli hingga 30 September 2024 di tujuh provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Aturan baru itu tercantum dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi pasal 9. ● **mar**

Megawati Batal Resmikan Kantor PDIP...

nyusul, Ibu ada kegiatan mendesak," kata Mahayatra kepada detikBali melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (5/6). Megawati disebut mendadak harus kembali ke Jakarta karena

pada Selasa (4/6) harus memimpin rapat DPP yang disebutnya sangat penting.

"Napi materi rapatnya tyang ndak tau (apa materi rapatnya, saya tidak tahu), mungkin terkait kondisi poli-

tik yang saat ini sedang terjadi," imbuh Bupati Gianyar periode 2018-2023 itu.

Untuk waktu kapan diresmikan lagi, Mahayatra meminta untuk menunggu dan bersabar. Padahal agenda

peresmian sudah dipersiapkan dengan baik. Bendera PDIP dipasang di sepanjang Jalan Bypass Dharma Giri, Buruan, Gianyar sejak dua minggu lalu. PDIP Gianyar juga

mempersiapkan penyambutan Megawati dengan maksimal. Yakni, dengan menampilkan tarian Bali, sambutan gamelan balegung, dan tabuh gong adimerdangga. ● **mar**

UU KIA Disahkan, Wanita Melahirkan...

ini menyangkut dengan bagaimana kita ingin mempersiapkan SDM Indonesia yang kuat, ya, dan unggul," ujar Ace di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6).

Ace menjelaskan, 1.000 hari pertama kehidupan merupakan fase yang sangat krusial bagi kehidupan anak Indonesia. Menurutnya, cuti melahirkan merupakan salah satu upaya untuk menekan angka stunting.

"Kalau Indonesia mau menghadapi Indonesia Emas 2045, tentu dari sejak awal kita harus memper-

siapkan generasi yang kuat dan unggul. Salah satunya dipersiapkan ketika sejak di dalam janin hingga keluar, hingga usia 2 tahun, itu adalah masa yang sangat penting untuk mempersiapkan fase kehidupan anak-anak Indonesia," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Meski demikian, Ace mengklarifikasi bahwa cuti melahirkan yang didapat sebenarnya hanya 3 bulan. Namun, dalam kondisi tertentu, seorang ibu pekerja bisa memperpanjang cuti

melahirkan sampai 6 bulan.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan menjadi undang-undang (UU). Itu artinya, ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan sampai 6 bulan.

Pasal 4 ayat (3), tertulis bahwa seorang ibu mendapatkan hak cuti melahirkan.

"Selain hak sebagaimana

na dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan:

a. cuti melahirkan dengan ketentuan: paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

b. waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami

keguguran.

c. kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi serta melakukan laktasi selama waktu kerja.

d. waktu yang cukup dalam hal diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak; dan/atau.

e. akses penitipan anak yang terjangkau secara jarak dan biaya.

Di ayat selanjutnya, tertulis bahwa pihak pemberi kerja wajib memberikan hak cuti melahirkan tersebut. ● **mar**

Studi Ungkap Indonesia Konsumsi Mikroplastik Terbanyak di Dunia

JAKARTA(IM)- Studi terbaru mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masyarakatnya paling banyak mengonsumsi mikroplastik di dunia dari total 109 negara.

Sebuah studi yang dipublikasikan Environmental Science & Technology mengungkap bahwa Indonesia bersama dua negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia dan Filipina menduduki peringkat teratas dalam daftar konsumsi mikroplastik per kapita global.

Para peneliti menemukan bahwa masyarakat Indonesia mengonsumsi sekitar 15 gram mikroplastik per bulan. Jumlah konsumsi tersebut sebagian besar bersumber dari air, seperti makanan laut.

Menurut para ahli, jumlah tersebut meningkat sebesar 59 kali lipat selama 1990 hingga 2018. Tak hanya itu, tingkat konsumsi mikroplastik masyarakat Indonesia bahkan mengalahkan Amerika Serikat (AS) yang "hanya" sekitar 2,4 gram per bulan.

"Jumlah di Indonesia lebih banyak dibandingkan negara lain dengan sebagian besar partikel plastik berasal dari sumber air seperti makanan laut. Jumlah tersebut merupakan peningkatan konsumsi mikroplastik harian sebesar 59 kali lipat dari 1990 hingga 2018," tulis laporan studi tersebut, dikutip Selasa (4/6).

Para peneliti menyebutkan, faktor yang menyebabkan meningkatnya tingkat "konsumsi" bahan plastik di negara berkembang, termasuk di Asia Timur dan Selatan adalah industrialisasi. Tak hanya itu, industrialisasi juga mengakibatkan timbunan sampah dan serapan mikroplastik oleh manusia.

"Negara-negara industri justru mengalami tren sebaliknya, didukung oleh sumber daya ekonomi yang lebih besar untuk mengurangi dan menghilangkan sampah plastik," kata dosen senior di Cornell Atkinson Center for Sustainability, Fengqi You.

Adapun, hasil studi ini muncul berdasarkan model data yang memperkirakan berapa banyak jumlah mikroplastik yang tanpa sadar dimakan dan dihirup oleh manusia akibat sampah plastik yang tidak diolah, terdegradasi, dan menyebar ke lingkungan.

Dalam memperkirakan tingkat konsumsi manusia secara lebih komprehensif, studi Cornell itu memperhitungkan kebiasaan makan, teknologi pemrosesan makanan, demografi usia, dan laju pemaparan di setiap negara. "Penyerapan mikroplastik di tingkat negara merupakan indikator penting dari polusi plastik dan risiko kesehatan masyarakat," kata You; Profesor Roxanne E.; Michael J. Zak; dan mahasiswa doktoral, Xiang Zhao.

"Pemetaan global yang komprehensif mendukung upaya mitigasi polusi lokal melalui peningkatan pengendalian kualitas air dan daur ulang limbah yang efektif," tambah mereka.

Studi ini menilai penyerapan makanan dengan mengumpulkan data konsentrasi mikroplastik di subkategori kelompok makanan utama, seperti buah-buahan, sayuran, protein, biji-bijian, produk susu, minuman, gula, garam, dan rempah-rempah.

Para peneliti mengungkapkan, model tersebut juga menggunakan data yang merinci berapa banyak makanan yang dikonsumsi di berbagai negara. Sebagai contoh, konsumsi garam meja per kapita di Indonesia dan AS hampir sama, tetapi konsentrasi mikroplastik dalam garam meja di Indonesia 100 kali lebih tinggi.

Sementara itu, negara yang menduduki peringkat atas yang masyarakatnya paling banyak menghirup mikroplastik adalah Tiongkok dan Mongolia, yakni menghirup lebih dari 2,8 juta partikel per bulan. "Penduduk AS menghirup sekitar 300 ribu partikel per bulan. Hanya penduduk di Mediterania dan sekitarnya yang menghirup lebih sedikit, seperti Spanyol, Portugal, dan Hongaria dengan sekitar 60 ribu hingga 240 ribu partikel per bulan," lapor para peneliti. ● **tom**

Jutaan Anak Meninggal di Dunia Tiap Tahun Akibat Diare

JAKARTA(IM)- Keamanan pangan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K) mengatakan makanan memiliki risiko terpapar bakteri atau kuman penyebab penyakit apabila tidak diolah secara baik.

"Jadi jangan sampai anak-anak kita diberi makan yang terkontaminasi kuman atau bakteri dari makanan yang tercemar," kata Piprim dalam diskusi daring dalam rangka Hari Keamanan Pangan Sedunia yang dipantau di Jakarta, Selasa (4/6).

Adapun risiko paparan bakteri berasal dari proses produksi, penyimpanan, hingga penyalurannya sehingga perlu dipastikan setiap proses yang dilalui telah memenuhi aspek keamanan makanan.

IDAI mencatat, jutaan anak di seluruh dunia meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit diare yang berhubungan erat terhadap makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, atau

parasit seperti daging, ayam, ikan, hingga susu. "Cara makannya dan kemasaannya perlu diperhatikan karena kuman atau bakteri ini bisa mengontaminasi lewat itu. Jadi harus diolah dengan baik, dikemas dengan baik, dan lainnya," ujarnya.

Piprim menekankan, setelah rangkaian proses produksi hingga penyalurannya yang memenuhi aspek keamanan, selanjutnya adalah memastikan kandungan gizi serta nutrisi sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Menurut dia, terdapat epidemi obesitas secara global akibat penyakit diabetes yang dialami oleh anak-anak dan penyakit hipertensi pada remaja disebabkan oleh kandungan makanan yang tidak terkontrol.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar orang tua senantiasa memperhatikan asal makanan dan kandungan gizinya agar anak-anak tumbuh sehat dan terhindar dari penyakit. "Walaupun secara kandungan bersih, kemasan bersih, dapat izin edar dari BPOM tetapi ternyata nutrisinya merusak kesehatan anak-anak dan menyebabkan sindrom metabolik serta penyakit tidak menular lainnya. Sebagai orang tua jangan memberikan nutrisi yang berlebihan," kata dia. ● **tom**

InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Bambang Suryo Sularso.
PENANGGUNG JAWAB: Prayan Purba.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI: Frans G, Vitus DP, Berman LR.
ARTISTIK: M Rifki, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI-PROMOSI: Amir Mahmud, Nurbayin, Akhyar, Ferry S., Fatwa Yuda.
AGEN: SOLO (ABC), BELITUNG (Naskafa Tjen).
PANGKAL PINANG (Yuliani, John Tanzil), **BALIKPAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jefri/Meike, Jemmy), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **SURABAYA**, **MEDAN** dan **PONTIANAK**.
KEUANGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR: Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro),
BIRO SEMARANG: Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN: Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI: Beni, Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
HARGA ECERAN: Rp 2.500./leks (di luar kota Rp 3.000./leks), Harga Langganan Rp 50.000./Bulan.

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3
 Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720
 Tel : 021-6265566

Twitter: InternationalMedia @redaksi_IM